

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

Abdul Razak. 2012. *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara*. Malang: Litera.

Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Ade Kosasih. 2017. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Vanda.

A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus timur

Daud Silalahi and Kristianto P.H. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*. Bandung: Keni Media.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dudu Duswara Machmuddin. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: Refika Aditama.

Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Haris Retno. 2020. *Hukum Sumber Daya Alam*. Malang: Intelegensia Media.

Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Irwansyah, dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia



Budiardjo. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

g Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*

Menurut Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

N. H. T. Siahaan. 2006. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Adminsitrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sadjijono. 2008. *Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- . 2014. *Hukum Pertambangan mineral dan batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta;Garsindo.

Jurnal/Artikel:

Apep Andriana. *Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Illegal di Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Hukum. Vol 3 No 2. Pengadilan Agama Kabupaten Wakatobi.

Apip Syaripudin. 2020. "Penerapan Hukum dalam Pemberian izin Pengelolaan Usaha Pertambangan Batu Bara di Kalimantan". Jurnal Studi Multidisiplin. Fakultas Hukum Universitas Kuningan Indonesia. Vol. 11 Nomor 1.

A. Sakti R. S. Rakia. 2021. *Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19*. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2).

B.J Nasution. 2006. "Tinjauan tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik". Jurnal Demokrasi. Vol. V No. 2.



----- . 2006. Kordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pembangunan di Daerah. Jurnal DEMOKRASI Vol. V No.2.

chma Wandayati, dan Nur Rahmadayana Siregar. 2020. Wilayah

Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Masa Yang Akan Datang. Paradigma Jurnal Multidisipliner. Vol 1. No 1.

Fathoni. 2018. "Konstruksi Makna Izin sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung". Jurnal Hukum Peratun. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol. 1 Nomor 1.

Filep Wamafwa. 2020. Pengaturan Kebijakan Investasi dalam Rangka Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat. STIH Manokwari Press.

Friskilia Junisa Bastiana Darongke. Et.al. 2022. Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. Lex Privatum. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol.10. No.3.

Hakim I. 2014. "Dampak Kebijakan Pertambangan bagi Masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara". Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Vol 2 No 2.

Hemi Faradila. 2020. Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah). m Universitas Syiah Kuala. Jurnal MUDARRISUNA Vol. 11 No. 3.

Hunggurami, E. F. dalam Erick Eka Perkasa, Gina Bachtiar, dan Yusfita Chrisnawati. 2020. *Pemanfaatan Limbah Serbuk Marmer Daerah Trenggalek Sebagai Bahan Tambah Pada Pembuatan Paving Block*, Jurnal Pendidikan Teknik dan Vokasional, Volume 3. Nomor 2. Universitas Negeri Jakarta.

Muchamad Taufiq. 2023. Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda. Journal Equitable. Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang Vol.8 No.2 2023.

Muhammad Zulfan Hakim. 2019. Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. Jurnal Amanna Gappa. Vol. 27 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



it Danusaputro, dalam Zen Lutfulloh, dan Wahyu Donri. 2021. *Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (Iup) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 47, No. 2, Fakultas Hukum

Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Raden I. 2015. "Kajian Dampak Penambangan Batubara terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara". Laporan Penelitian Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Reno Fitriyanti. 2016. "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi". Jurnal Redoks. Universitas PGRI Palembang. Vol. 1 Nomor 1.

Retnadumillah Saliha. 2017. *Perizinan Pertambangan Batuan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Katalogis. Volume 5 Nomor 2. Universitas Tadulako.

Rezki Purnama Samad, A. M. Yunus Wahid, dan Hamzah Halim, 2021, *Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1, 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rifqy Maulana. 2018. "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan". Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 3.

Thelisia Kristin. "Pelaksanaan Pemberian izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MINERBA) di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Jurnal Hukum Adigama.

Wicipto Setiadi. 2009. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Legislasi Indonesia., Vol. 6.

Zen Lutfulloh. Wahyu Donri. Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol 47, No. 2.

Zulkifli Aspan. 2017. Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup). Jurnal Ammana Gappa, Vol. 25 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Website:

<https://www.esdm.go.id/>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.39 WITA.

Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia. Sony. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>. diakses pada tanggal 22 September 2022 Jam 22.49. <https://www.esdm.go.id/>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 23.39 WITA.

Muhammad Yunus, 2021, WALHI Sulsel Desak Pemerintah Bone Cabut Izin Tambang Marmer di Bontocani, DAS Walanae seharusnya menjadi daerah yang dilindungi dari aktivitas ekstraktif. <https://s Sulsel.suara.com/read/2021/04/06/181154/walhi-sulsel-desak-pemerintah-bone-cabut-izin-tambang-marmer-di-bontocani> dikases pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 14.00 WITA.

Indonesian Center for Enviromental Law. *Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. https://icel.or.id/wp-content/uploads/SeriAnalisis-ICEL-Minerba.rev1_-1.pdf diakses pada 13 Desember 2020.

Yanita Petriella. *Adu Cepat antara RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba*.

Ini Kata Ahli Tambang. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200225/44/1205770/adu-cepat-antara-ruu-cipta-kerja-dan-ruu-minerba-ini-kata-ahli-tambang> diakses pada 13 Desember 2020.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Undang Nomor 23 Tahun 2014

17 Tahun 2019 tentang sumber daya air

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

